

# Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

*by Gusti Dian Prayogi*

---

**Submission date:** 27-Sep-2022 02:23PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1910240578

**File name:** 1887-Article\_Text-5657-2-10-20220119.pdf (543.45K)

**Word count:** 4312

**Character count:** 27623



Tersedia online di <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas>

<https://doi.org/10.35457/xxx>



AMPP



## Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

Gusti Dian Prayogi<sup>1</sup>, Rudiana Fibriani<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan<sup>2</sup>

email: <sup>1</sup>[dian@stieyapan.com](mailto:dian@stieyapan.com), <sup>2</sup>[rudiana@stieyapan.com](mailto:rudiana@stieyapan.com)

### Kata kunci:

gender,  
tekanan ketaatan  
religiusitas,  
pengelola keuangan daerah

### Keyword:

Gender  
obedience pressure  
religiosity  
regional financial managers

Gusti Dian Prayogi, Rudiana Fibriani (2021). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro). *Akuntabilitas : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14 (2), 36-48

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun variabel yang digunakan ada tiga yaitu gender, tekanan ketaatan, dan agama. Hipotesis penelitian adalah ketiga variabel tersebut berpengaruh pada perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah.

Jenis penelitian ini adalah confirmatory research. Populasi penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada beberapa SKPD di Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro dan memiliki jabatan sebagai bendahara pengeluaran, yang pada akhirnya ditemukan sample sebanyak 43 orang untuk mengisi kuisioner penelitian. Dalam studi ini, kami menggunakan model Structural Equation Model (SEM) bersama dengan model analisis Partial Least Square (PLS) untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya. Analisis PLS diuji dengan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0 untuk Windows.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Gender tidak berpengaruh dalam perilaku tidak etis, tekanan ketaatan berpengaruh terhadap Perilaku Etis, sedangkan religiusitas berpengaruh terhadap Perilaku Etis

### ABSTRACT

The reason for this review was to analyze the elements that impact dishonest conduct in Territorial Monetary Administration. There are three factors utilized, to be specific sex, acquiescence pressure and furthermore legalism. The exploration speculation is that these three factors influence the tri-dishonest conduct did by local monetary supervisors.

This kind of examination is corroborative exploration. The number of inhabitants in this review are representatives who work in a few SKPD in the Public authority of Surabaya City, Malang Rule and Bojonegoro and have a situation as use financier, which in the end tracked down an example of 43 individuals to finish up the exploration poll. This review utilizes the Primary Condition Model (SEM) with Fractional Least Square (PLS) investigation model to test the theory that has been proposed beforehand. PLS examination was tried utilizing the assistance of SmartPLS programming variant 2.0 for windows

The consequences of the review clarify that sexual orientation has no impact on unscrupulous conduct, acquiescence pressure affects moral conduct, while legalism affects moral conduct.

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

<https://doi.org/10.35457/xxx>

© 2021 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah aset (hak) dan kewajiban (utang dan modal) daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik kabupaten/kota langsung di bawah pusat pemerintah, provinsi dan departemen atau lembaga diukur dalam nominal mata uang dalam kondisi bagaimanapun, dalam bentuk apapun, termasuk barang atau kapital. Sebagaimana diketahui, pengelolaan keuangan daerah merupakan gabungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah dan pengawasan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tentunya harus dilakukan secara tertib, hati-hati, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan prinsip keadilan, integritas, dan kemanfaatan.

Namun dalam praktiknya, sistem pengelolaan keuangan negara belum dikembangkan secara optimal, dalam arti dapat meminimalisir kerugian akibat kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara, baik keuangan maupun non keuangan. Korupsi masih merajalela dan menjadi penghambat perkembangan dan operasional pemerintahan daerah. Korupsi sering digunakan sebagai jembatan untuk membantu seseorang (individu) dan sekelompok orang (organisasi) mencapai tujuan yang diinginkan, terutama antara pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan regulator keuangan utama. (hidayah, 2018). Fenomena korupsi ini sudah memasuki ranah yang nyaris tidak terukur. Korupsi horizontal meluas ke hampir setiap cabang pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara vertikal, korupsi melekat pada semua pemerintahan hierarkis, dari pusat kekuasaan hingga tingkat terendah (Labolo, 2017). Sementara itu Azrianti et al.(2014), mengatakan bahwa APBD merupakan salah satu sasaran yang paling potensial dikorupsi oleh aparat pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan KPK (2019), yang didalamnya mengutip dari Transparency International Indonesia menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi

Indonesia Naik scorenya dari tahun 2015-2019, Namun, dari segi peringkat, kita bisa melihat peningkatan pada data di bawah ini.

Tabel 1. Indeks Presepsi Korupsi Indonesia

Tahun	Score	Rangking
2015	36	88/168
2016	37	90/168
2017	37	96/180
2018	38	89/180
2019	40	86/180

Sumber : Laporan Keuangan KPK 2019

Berdasarkan data statistik KPK dari tahun 2004-2020, Pulau Jawa menduduki peringkat kedua untuk kasus tindak pidana korupsi yakni sebanyak 330 kasus dimana peringkat pertama adalah pemerintah pusat, data lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Data Statistik KPK ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id))

Dalam webinar Pilkada Firlu Bahuri (Ketua KPK) bersama Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dikutip dari CNN Indonesia (2020) menyatakan bahwa kasus korupsi tertinggi di tangan KPK adalah Propinsi Jawa Barat sebanyak 101 kasus, kemudian provinsi dengan tingkat kasus korupsi terbanyak disusul Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 93 kasus, lalu Sumatera Utara sebanyak 73 kasus.

Kejahatan korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang tidak etis. Prilaku tidak etis ini muncul karena tidak ada Kesadaran etika dan sikap profesional. Adanya pengaruh

moral atau etika yang ada dalam diri individu yang tergabung dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah akan menyebabkan dampak bagi perilaku individu tersebut serta membawa dampak bagi etis tidaknya keputusan yang diambil (Rosyida, 2017). Perilaku individu merupakan gambaran secara kasat mata pada kepribadian yang dalam implementasinya tidak terlepas dari lingkungan dan system yang yang berlaku kemudian saling mempengaruhi satu sama lain, demikian juga kondisi internal yang melingkupi pegawai negeri atau sipil negara (Hasan, 2020). Selama paruh pertama tahun 2020, ICW menemukan bahwa 896 dari 906 terdakwa kasus korupsi sudah didakwa. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki menempati angka tertinggi. (Data ICW; 2020)

Gender merupakan variabel yang sangat memberikan dampak signifikan dalam membuat keputusan strategis. Gender yang diartikan dalam tulisan ini bukan pengertian gender sebagai "jenis kelamin". Namun, merupakan sikap atau sifat yang melekat pada seorang pria ataupun wanita yang dapat berubah seiring berjalannya waktu dan kondisi yang ada pada lingkungan kerja (Pratama & Chaniago, 2018). Menurut Ade Irawan Peneliti dari Indonesia Corruption Watch dikutip dari <https://nasional.republika.co.id/>, ada faktor pendorong utama yang menjadi modus bagi aparatur yang bekerja pada birokrasi dalam melakukan tindakan tidak etis yang pada akhirnya menimbulkan korupsi, yaitu tekanan dari atasan. Level religius seseorang dalam hal ini memegang peran yang penting dalam kehidupan berperilaku. Tingkat pemahaman keagamaan (religius) dalam hal ini adalah pengamalan ajaran agama yang diekspresikan dalam bentuk iman dan kepercayaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tindakan sehari-hari baik saat bekerja, ataupun bersosialisasi religiusitas akan memeriksa. Religiusitas akan mempengaruhi suatu perilaku (Fridayanti, 2016).

Menurut Wardana & Mimba (2016), gender tidak memberikan dampak signifikan pada perilaku tidak etis seorang akuntan pendapat yang sama dikemukakan pada penelitian Damayanthi & Juliarsa (2016). Menurut Cahyaningrum dan Utami, 2015, tekanan ketaatan berpengaruh pada perilaku etis, hal serupa dikemukakan dalam penelitian Sumanto dan Rosdiana (2019), namun Cahya dan Mukiwihando (2020) justru mengungkapkan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh pada perilaku etis dan

tidak etis. Menurut Pemayun dan Budiasih (2018), Religiusitas berpengaruh pada keputusan perilaku etis, pendapat yang sama juga dikemukakan pada penelitian Dewanta dan Machmuddah (2019), namun berbeda hasilnya pada penelitian yang dikemukakan oleh Egita (2020).

Berbagai penelitian tersebut masih menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten oleh karenanya peneliti tertarik melakukan penelitian yang sama dengan mereplikasi hasil research peneliti pendahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel yang sedikit berbeda yaitu gender, tekanan ketaatan dan religiusitas dalam mengungkapkan tidak etis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan daerah adalah keuangan pada sektor publik yang semua hak dan kewajiban daerah (secara otonom) yang dapat dinilai dengan uang, seluruhnya dalam bentuk moneter (uang) dan barang yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan kekayaan dan hutang daerah. Kewenangan mengelola Keuangan daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Damanik (2018) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai suatu organisasi pengelolaan sistem akuntansi yang juga memiliki pelaksana pada bidang akuntansi dimana terdiri dari Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Kepala daerah atas usul Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK SKPD) mengangkat bendahara penerimaan dan pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidanaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja SKPD. Dapat dilihat disini bahwa perilaku etis dan tidak etis dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bergantung dari subyek atau pelaku yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga hal ini yang menjadi motivasi penelitian ini untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengambil Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagai subyeknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap karakteristik individu akuntan sebagai bagian dari usaha dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bekerja sebagai pengelola keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian konfirmatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel penanda dan memvalidasi model yang diturunkan dari teori dan penelitian sebelumnya. Adapun peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan survei kuesioner terhadap masyarakat sasaran. Sumber datanya adalah opini atau persepsi pegawai pemerintah terkait pembayaran anggaran, praktik akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pegawai tersebut adalah pegawai SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro.

Populasi yang menjadi fokus dalam riset ini mencakup semua pihak yang berwenang serta bertanggungjawab atas aktifitas pembelanjaan dengan anggaran yang berasal dari APBD, pelaksanaan aktivitas pencatatan (accounting) dan orang-orang yang bertugas melakukan aktivitas penyusunan laporan realisasi atau pertanggungjawaban pada SKPD Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro. Adapun yang menjadi maksud peneliti memilih Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro sebagai sample adalah dikarenakan ketiga kota tersebut dianggap mewakili 3 besar kota di Jawa Timur dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018-2019. Terkait dengan sampel yang dijadikan ilustrasi penelitian ini menitik beratkan pada pegawai yang bekerja pada SKPD Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro, dimana setelah dilakukan inventarisasi sample didapatkan 43 responden dengan penyebaran kuisisioner untuk 3-5 aparatur keuangan di setiap SKPD.

Penelitian ini akan secara terperinci menelaah rata-rata tanggapan responden terhadap setiap item pada variabel (X2) Tekanan Ketaatan, (X3) Religiusitas dan (Y) Perilaku Etis, keempat puluh tiga responden yang berasal dari aparatur keuangan daerah memberikan respon jawaban terhadap pada setiap item indikator variabel penelitian tersebut. Guna membaca dengan mudah hasil rata-rata tanggapan responden, penelitian ini melakukan pengelompokan interval class sebagai metode mengkalkulasi nilai (score) yang direspon oleh responden, dengan pengecualian variabel (X1) Gender karena merupakan data biner bukan hasil data kuesioner sehingga tidak dapat dideskripsikan menggunakan kelas interval.

$$\text{Interval Class} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

Tabel 2

Kelas Interval

Jarak (interval)	Kategori	Keterangan	Nilai
1,00 sampai dengan 1,80	Sangat Tidak Setuju	Sangat Buruk	1
1,80 sampai dengan 2,60	Tidak Setuju	Buruk	2
2,60 sampai dengan 3,40	Netral	Biasa	3
3,40 sampai dengan 4,20	Setuju	Baik	4
4,20 sampai dengan 5,00	Sangat Setuju	Sangat Baik	5

### Instrumen Penelitian

Alat bantu dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta penelitian.

### Uji Instrumen

Dalam studi ini, kami menggunakan model Structural Equation Model (SEM) bersama dengan model analisis Partial Least Square (PLS) untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya. Analisis PLS diuji menggunakan perangkat software SmartPLS versi 2.0 for Windows.

#### 1) Evaluasi dalam Measurement Model

Pada outer model, akan dilakukan penjabaran mengenai validitas dan reliabilitas atas setiap indikator yang sudah di transformasi pada PLS. Validitas indikator terdiri dari validitas konfergen (*Convergent validity*) dan validitas diskriminasi, sedangkan reliabilitas dapat dilihat dari composite reliability

- a) *Convergent validity* dilakukan dengan melihat tabel yang dihasilkan dari pengolahan data yang kemudian disajikan dalam outer loadings. Penentuan limit loading factor adalah sebesar 0,5. Dari sini dapat disimpulkan bahwa andai kata nilai *loading factor* lebih besar dari angka 0,5 maka validitas konfergen (*convergent validity*) dinyatakan telah terpenuhi, namun sebaliknya andaikata nilai *loading factor* kurang dari 0,5 maka konstruk harus di drop dari analisis (Ghozali, 2006)
- b) Validitas diskriminan diterapkan agar semua rancangan pada setiap variabel tersembunyi terjadi perbedaan dengan variabel lainnya (Ghozali, 2006).



c) Composite Reliability diperlukan dalam hal memberikan ukuran kestabilan dan ukuran konstan (konsistennya) suatu alat ketika menimbang suatu rancangan riset atau variabel. Kriteria keandalan (reliabilitas) juga dapat dilihat pada angka keandalan struktural (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, reliabilitas dapat diukur melalui skor reliabilitas kumulatif.

## 2) Evaluasi Struktural Model

Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan dengan tujuan menaksirkan hubungan keutuhan variabel baik dependen maupun independen (variabel prediktif) di dalam penelitian ini. Pengukuran inner model dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan dampak pada hubungan antar variabel, bersama tingkat signifikansi dampak hubungan variabel secara keseluruhan dalam kerangka penelitian yang didesain. Pengukuran inner model dengan tujuan pengujian dampak signifikansi antar variabel dalam penelitian menggunakan analisa angka R<sup>2</sup> (*R Square*). *R Square* (R<sup>2</sup>) bisa juga dikenal dengan nama lain koefisien determinasi. Nilai *R Square* (R<sup>2</sup>) terletak antara 0 sampai dengan 1, dan model dikatakan memiliki kecocokan jika memiliki nilai *R Square* (R<sup>2</sup>) semakin mendekati 1 (Ghozali, 2005).

## 3) Uji Hipotesis

Nilai yang dihitung dari koefisien jalur antara struktur harus diperhitungkan. Pentingnya hubungan tergantung pada prosedur Bootstrapping. Angka yang nantinya dihasilkan akan membentuk nilai t-hitung. Jika t-hitung memiliki nilai lebih besar dari t-tabel (1,96) berada di level dibandingkan dengan tabel Jika signifikan (5%), maka nilai koefisien jalur yang dihitung adalah signifikan (Ghozali, 2011).

## PEMBAHASAN

### Gender

Gender (X1) terhadap 43 responden yang telah mengisi kuesioner untuk dijadikan sebagai subjek pada penelitian ini, menghasilkan suatu konklusi bahwa mayoritas responden yang menjadi subjek pada penelitian ini paling banyak berjenis kelamin perempuan tepatnya ada sejumlah 30 individu dari jumlah total responden sebesar 43 individu dengan persentase sebesar 69,8% dari jumlah total keseluruhan populasi yang digunakan, sedangkan laki-laki hanya memiliki dengan jumlah 13 individu dari jumlah total responden sebesar 43 individu dengan persentase sebesar 30,2% dari jumlah total keseluruhan populasi yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan dengan jumlah mayoritas populasi subjek penelitian maka tentunya perempuan akan lebih memiliki jumlah suara yang dominan dibandingkan hasil jawaban kuesioner dari laki-laki. Hal tersebut akan berdampak terhadap keseluruhan persepsi data yang terbentuk dalam penelitian ini, yang akan banyak ditentukan oleh jawaban kuesioner dari pihak perempuan dan dapat menjadi representasi mayoritas jawaban dibandingkan dengan laki-laki.

#### **Tekanan Ketaatan (X2)**

Hasil perhitungan tanggapan responden memperlihatkan bahwa nilai rata-rata dari jumlah seluruh item yang didapat oleh variabel Tekanan Ketaatan (X2) adalah 4,18, itu berarti berada pada jarak interval  $3,40 \leq 4,20$  yang artinya variabel Tekanan Ketaatan (X2) dinilai setuju oleh responden.

#### **Religiusitas (X3)**

Hasil perhitungan tanggapan responden memperlihatkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh jumlah yang didapat oleh variabel Religiusitas (X3) adalah 4,23, artinya angka yang dihasilkan pada olah data tersebut berada pada jarak interval  $4,20 \leq 5,00$ . Hal ini mengantndung pengertian bahwa variabel Religiusitas (X3) dinilai sangat setuju oleh responden.

#### **Perilaku Etis (Y)**

Hasil perhitungan tanggapan responden mengindikasikan bahwa nilai rata-rata seluruh jumlah yang didapat oleh variabel Perilaku Etis (Y) adalah 4,39 yang berada pada kelas interval  $4,20 \leq 5,00$  yang artinya variabel Perilaku Etis (Y) dinilai sangat setuju oleh responden

#### **Pembuktian Hipotesis**

---

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

<https://doi.org/10.35457/xxx>

© 2021 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

Penelitian ini memfokuskan pada tiga hipotesis pengujian. Adapun hasil masing-masing fokus pengujian dipaparkan pada tabel berikut ini

Tabel 2

## Hasil Pengukuran Bootstrapping

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )	Ket
GDR (X1) -> PET (Y)	0.027731	0.028501	0.016921	0.016921	1.638809	Tidak Signifikan
TKT (X2) -> PET (Y)	0.411894	0.415521	0.022885	0.022885	17.998644	Signifikan
RLG (X3) -> PET (Y)	0.294615	0.291285	0.030887	0.030887	9.538624	Signifikan

Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

**H1: Gender berpengaruh terhadap Perilaku Etis**

Berdasarkan output pengujian dalam tabel pada atas, efek Gender terhadap Perilaku Etis yg menampakan output nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif yaitu 0.027731 & t-Statistik sebanyak 1.638809 < t-tabel (yaitu 1.96) maka asumsi H1 tidak dapat diterima, Dampak gender pada perilaku etis dapat diartikan sebagai berpengaruh positif namun dapat diabaikan karena tidak menunjukkan signifikansi. Maka asumsi yang diajukan terkait dengan, "Gender berpengaruh terhadap Perilaku Etis" tidak dapat diterima dalam penelitian ini. Hasil tersebut ekuivalen dengan output riset yang dilakukan oleh Wardana & Mimba (2016) dan Damayanthi & Juliarsa (2016) yang menerangkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan pada perilaku tidak etis akuntan.

**H2: Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap Perilaku Etis**

Berdasarkan output pengujian dalam tabel pada atas, pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Perilaku Etis yang menampakan output nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif yaitu 0.294615 dan t-Statistik sebesar 17.998644 > t-tabel (1.96) maka asumsi H2 diterima, Hal ini dapat diartikan sebagai efek dari tekanan ketaatan pada perilaku tidak Etika memiliki dampak positif dan cukup signifikan. Maka hipotesis yang diajukan berkaitan dengan "Tekanan kepatuhan mempengaruhi perilaku etis" selaras dengan hasil penelitian yang disampaikan dalam jurnal penelitian milik Cahyaningrum dan

Utami (2015) dan Sumanto dan Rosdiana (2019), namun tidak ekuivalen dengan output riset yang dijalani oleh Cahya dan Mukiwihando (2020).

### **H3: Religiusitas berpengaruh terhadap Perilaku Etis**

Berdasarkan output pengujian dalam tabel pada atas, pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Etis yang menampakan output nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif yaitu 0.294615 dan t-Statistik sebesar 9.538624 > t-tabel (1.96) oleh karenanya asumsi H3 diterima, hal ini menjelaskan suatu analisa bahwa pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Etis terbukti berperan secara positif dan signifikan. Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, "Religiusitas berpengaruh terhadap Perilaku Etis" mendapatkan dukungan dengan arah pengaruh yang positif di dalam penelitian ini. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemayun dan Budiasih (2018), Religiusitas berpengaruh pada keputusan perilaku etis, dan Dewanta dan Machmuddah (2019), namun tidak selaras dengan penelitian yang dikemukakan oleh Egita (2020) yang justru menyatakan bahwa sebaliknya.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil hipotesis yang dilakukan pengujian sebelumnya dan pembahasan yang sudah diuraikan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Gender tidak berpengaruh dalam perilaku tidak etis
- 2) Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap Perilaku Etis
- 3) Religiusitas berpengaruh terhadap Perilaku Etis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ancok, D., & Suroso, F. N. (2012). Psikologi Islami (Islamic psychology). In *Nucleic Acids Research*.

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

<https://doi.org/10.35457/xxx>

© 2021 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

- Azrianti, R. S., Puspa, D. F., & Herawtati. (2014). [Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah \(APBD\) Di Sumatera Barat](#). Jurnal Fakultas Ekonomi.
- Bohls, E. A. (2020). Gender. In Handbook of British Travel Writing. <https://doi.org/10.1515/9783110498974-004>
- Cahya, G. A. E., & Mukiwihando, R. (2020). [THE EFFECT OF GOAL ORIENTATION, SELF EFFICACY, OBEDIENCE PRESSURE, AND TASK COMPLEXITY ON AUDIT JUDGMENT AT INSPECTORATE GENERAL OF THE MINISTRY OF FINANCE](#). JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK.
- Cahyaningrum, C., & Utami, I. (2015). [Apakah tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap keputusan etis?](#) Simposium Nasional Akuntansi 18.
- Damanik, E. S. (2018). [PERBEDAAN PERILAKU ETIS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA SKPD BERDASARKAN FAKTOR INDIVIDUAL DALAM ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH \(SKPD\) DI KABUPATEN SAROLANGUN](#). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
- Damayanthi, P., & Juliarsa, G. (2016). [PENGARUH IDEALISME, RELATIVISME, PENGETAHUAN, GENDER DAN UMUR PADA PERILAKU TIDAK ETIS AKUNTAN](#). E-Jurnal Akuntansi.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). [Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion](#). Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Egita, E. (2020). [Pengaruh Religiusitas, Reward and Punishment, dan Job Rotation Terhadap Fraud](#). Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i1.1022>
- Fridayanti, F. (2016). [RELIGIUSITAS, SPIRITUALITAS DALAM KAJIAN PSIKOLOGI DAN URGENSI PERUMUSAN RELIGIUSITAS ISLAM](#). Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi. <https://doi.org/10.15575/psy.v2i2.460>
- Griffin, R. W. (2015). Attitude Theory. In Wiley Encyclopedia of Management. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom110113>
- Gurr, B., & Naples, N. A. (2015). Sex and gender. In Handbook of Sociology and Human Rights. <https://doi.org/10.4324/9781315634227>
- Hasan, E. (2020). [PERILAKU KOMUNIKASI APARATUR SIPIL NEGARA \(ASN\) DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KERJA SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT](#). Jurnal Tatapamong. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1140>
- Hasanudin, A. I., & Pangayow, B. J. (2016). [Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis \(Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Keerom\)](#). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah.
- hidayah, siti nurul. (2018). korupsi dan (kegagalan) otonomi daerah. Beritagar.Id.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). Perilaku Organisasi Organizational Behavior. In 1.
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Widya Praja. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50> Lucyanda, J., & Sholihin, M. (2016). [Peran Gender dan Kode Etik dalam Penilaian Moral atas Budgetary Slack](#). Simposium Nasional Akuntansi XIX.

---

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

<https://doi.org/10.35457/xxx>

© 2021 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

- Pemayun, A. W., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). [PENGARUH RELIGIUSITAS, STATUS SOSIAL EKONOMI DAN LOVE OF MONEY PADA PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI](#). E-Jurnal Akuntansi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah](#). Jurnal Media Hukum.
- Pratama, D. F., & Chaniago, H. (2018). Pengaruh Gender Terhadap Pengambilan Keputusan di Lingkungan Kerja. Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi.
- Rosyida, I. A. (2017). [Perilaku Etis Dan Tidak Etis Oleh Akuntan Dalam Sebuah Organisasi](#). Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i1.16>
- Sumanto, A., & Rosdiana, M. (2019). [PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, TEKANAN KETAATAN DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGEMENT](#). PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5876>
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Hardinto, W. (2018). [Pentingkah Nilai Religiusitas dan Budaya Organisasi untuk Mengurangi Kecurangan?](#) Jurnal Akuntansi Multiparadigma. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010>
- Wardana, A., & Mimba, N. (2016). [Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Dan Gender Pada Sikap Etis Mahasiswa Magister](#). E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.
- Weiner, B. (2015). Heider, Fritz (1896-1988). In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.61048-6>

# Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
2	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	1%
3	Amadea Devota, Hero Priono. "Etika Auditor sebagai Pemoderasi Fee Audit, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit", Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2021 Publication	1%
4	<a href="http://lib.ibs.ac.id">lib.ibs.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ejurnal.stieyapan.ac.id">ejurnal.stieyapan.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	1%

7	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1 %
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
9	www.researchgate.net Internet Source	1 %
10	baj.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
11	media.neliti.com Internet Source	1 %
12	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
13	bp4d.belukab.go.id Internet Source	1 %
14	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	1 %
15	pt.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On



# Faktor yang Mempengaruhi Perilaku tidak Etis pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Kasus pada SKPD di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Bojonegoro)

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---